



## Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Pengangguran di Indonesia

Triyas Ayu Hadi Setiowati<sup>1</sup> & Ris Yuwono Yudo Nugroho<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

### Article Infortion

Article history:

Received 25 December 2020;

Received in revised form 27

January 2020; Available online 29

January 2021

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the impact of monetary policy as seen from the BI Rate and the money supply (M2), and fiscal policy as seen from government spending and tax revenue in influencing the unemployment rate in Indonesia. The approach used in this research is quantitative. The data used are the BI Rate, the money supply (M2), government spending, tax revenue and unemployment in the form of time series data in an annual form from 1995 to 2019. The method used in this study is the Vector Auto analysis model. Regression (VAR). The stages used in this research test are a stationarity test, optimum lag test, VAR stability test, impulse response test, and variance decomposition test. The results of the impulse response indicate that the unemployment variable responds most to the shock of the interest rate variable (monetary policy) compared to other variables. The results of variance decomposition indicate that the contribution given by the BI Rate to the unemployment rate is the most significant relative to the contribution given by the variable money supply (M2), government spending, and tax revenue.*

**Keywords:** Monetary Policy, Fiscal Policy, Unemployment, VAR

*Tujuan penelitian untuk menganalisis dampak kebijakan moneter ditinjau dari suku bunga BI Rate dan jumlah uang beredar (M2), dan dampak kebijakan fiskal ditinjau dari pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak, untuk mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah suku bunga BI Rate, jumlah uang beredar (M2), pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak, dan pengangguran, berupa data runtun waktu, dalam bentuk tahunan, yaitu tahun 1995 hingga tahun 2019. Metode yang digunakan adalah model analisis Vector Auto Regression (VAR). Tahapan-tahapan yang digunakan dalam pengujian penelitian adalah uji stasioneritas, uji lag optimum, uji stabilitas VAR, uji impulse response, dan uji variance decomposition. Hasil impulse response menunjukkan bahwa variabel pengangguran paling merespon adanya guncangan variabel suku bunga (kebijakan moneter) dibandingkan variabel-variabel lainnya. Hasil variance decomposition menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan variabel suku bunga BI Rate terhadap pengangguran relatif paling besar dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan variabel jumlah uang beredar (M2), pengeluaran pemerintah, dan penerimaan pajak.*

**Kata kunci:** Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, Pengangguran, VAR

## PENDAHULUAN

Menurut Samuelson (1992), pengangguran yang tinggi termasuk kedalam masalah ekonomi dan masalah sosial. Ketika angka pengangguran meningkat, sebagai dampaknya suatu negara membuang barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran. Pengangguran juga merupakan masalah sosial yang besar karena mengakibatkan penderitaan yang besar untuk pekerja yang menganggur yang harus berjuang dengan pendapatan yang berkurang. Biaya ekonomi dari pengangguran jelas besar, namun tidak ada jumlah mata uang yang dapat

mengungkapkan secara tepat tentang korban psikologi dan manusia pada saat mereka menganggur.

Pengangguran Indonesia cenderung mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 1980 sampai tahun 2018. Pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang terus menerus membengkak. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya di bawah 5 persen dan pada tahun 1997 sebesar 4,68 persen. Tingkat pengangguran sebesar 4,68 persen

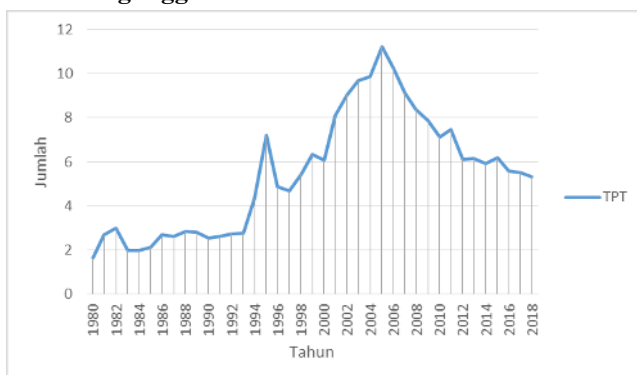
Author Correspondence:

E-mail: <sup>2</sup>[ris.nugroho@trunojoyo.ac.id](mailto:ris.nugroho@trunojoyo.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.33005/jdep.v4i1.205>

masih merupakan pengangguran dalam skala yang wajar.

**Tabel 1.**  
**Data Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2018**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Dalam negara maju, tingkat penganggurannya biasanya berkisar antara 2 – 3 persen, hal ini disebut tingkat pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran alamiah adalah suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan tak mungkin dihilangkan. Artinya jika tingkat pengangguran paling tinggi 2 - 3 persen itu berarti bahwa perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (*Full Employment*) (Sukirno, 2008).

Mishkin (2010) menyatakan bahwa kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral terkait dengan manajemen uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi variabel di dalam perekonomian. Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah terciptanya stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (terjaganya laju inflasi), membaiknya pendapatan per kapita, serta tersedianya kesempatan kerja yang luas.

Selaras dengan tujuan utama dari sistem ekonomi nasional yaitu mencapai kesejahteraan baik material maupun non material, maka tujuan kebijakan fiskal tentu saja dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam mencapai tujuan ekonomi nasional tersebut. Secara lebih khusus, kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah tersedianya kesempatan kerja yang luas dan berkurangnya jumlah pengangguran. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Ayat 2 yang secara tegas menyatakan bahwa semua warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal, diantaranya melalui pengeluaran

pemerintah yang diarahkan kepada penyediaan overhead sosial dan ekonomi. Pengeluaran tersebut dapat dijadikan sebagai stimulus untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan dan menaikkan efisiensi produktif perekonomian dalam jangka panjang (Prasetyia, 2012).

Deliarnov (2009) menyatakan bahwa kebijakan fiskal mulai dikenal ketika John Maynard Keynes mengutarakan pendapatnya, bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang paling efektif dalam mempengaruhi jalannya perekonomian terutama dalam memberantas pengangguran dan meningkatkan output, melalui campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Sedangkan dari sisi lain, kaum klasik lebih menekankan kebijakan moneter dalam mengatasi masalah perekonomian. Menurutnya, kebijakan fiskal kurang efektif dalam mengatasi masalah perekonomian karena memiliki *Efek Crowding Out* dalam kebijakan tersebut dan hanya akan meningkatkan suku bunga sehingga mengurangi pengeluaran swasta terutama investasi serta tidak berpengaruh pada pendapatan nasional. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan dua kebijakan stabilisasi makroekonomi yang saling berkaitan dalam mempengaruhi siklus ekonomi.

Pada penelitian Anarki (2017) yang berjudul “*Unemployment Orthodoxy: Fiscal or Monetary Policy? Case Study of France*” dengan menggunakan metode OLS dan GMM menunjukkan bahwa variabel kebijakan fiskal lebih berpengaruh terhadap pengangguran di Prancis daripada kebijakan moneter.

Penelitian Attamah, et. al. (2015) yang berjudul “*The Impact Of Fiscal And Monetary Policies On Unemployment Problem In Nigeria (Managerial Economic Perspective)*” dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) menunjukkan hasil pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif terhadap masalah pengangguran di Nigeria. Kebijakan moneter menunjukkan bahwa jumlah uang beredar dan nilai tukar memiliki dampak positif dan signifikan dimana variabel tingkat bunga memiliki hubungan positif pada masalah pengangguran di Nigeria. Studi ini juga mengungkapkan bahwa kenaikan suku bunga dan nilai tukar meningkatkan pengangguran dengan meningkatkan biaya produksi yang menghambat sektor swasta mempekerjakan tenaga kerja besar. Di sisi lain,

produktivitas nasional yang diukur dengan PDB riil memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Nigeria.

Penelitian dilakukan Ayusalinda (2015) yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Kebijakan Fiskal, dan Moneter Terhadap Pengangguran di Indonesia” dengan menggunakan metode analyzer model path analysis menunjukkan bahwa Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia; 2) terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pajak terhadap pengangguran di Indonesia, ini mengidentifikasi bahwa besar kecilnya tarif pajak yang ditetapkan menentukan tinggi rendahnya tingkat pengangguran di Indonesia; 3) Tinggi rendahnya tingkat pengangguran menentukan besar kecilnya jumlah uang beredar di Indonesia. Disamping itu, jumlah uang beredar secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia; 4) suku bunga secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia artinya jika variabel suku bunga ditingkatkan, maka pengangguran di Indonesia akan turun; dan 5) inflasi secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia artinya jika variabel inflasi meningkat akan berdampak terhadap pengangguran di Indonesia.

Penelitian Sumando (2015) yang berjudul “*Fiscal and Monetary Policy Interaction in Indonesia: A VAR Analysis From 2000 to 2013*” dengan menggunakan metode VAR, menunjukkan bahwa tidak adanya dominasi kebijakan fiskal di Indonesia and ITF berjalan dengan efektif dalam mencapai target inflasi. Kebijakan moneter yang kontraktif dari Bank Indonesia mampu mempengaruhi hampir 30 persen dari perubahan variasi inflasi setelah dua tahun. Di lain sisi, kebijakan fiskal ekspansif hanya mampu mengurangi pengangguran pada jangka pendek, yang akhirnya berpotensi meningkatkan inflasi.

Pada penelitian yang telah dilakukan Tagkalakis (2013) yang berjudul “*The Unemployment Effects Of Fiscal Policy: Recent Evidence From Greece*” dengan menggunakan metode SVAR menunjukkan hasil bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah akan menurunkan pengangguran. Sementara pada

variabel pajak, peningkatan pajak akan meningkatkan pengangguran.

Setiap negara memiliki caranya masing-masing dalam mengurangi tingkat pengangguran. Indonesia menggunakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sebagai cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi tingginya tingkat pengangguran. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penulis adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel ekonomi moneter dan kebijakan fiskal terhadap pengangguran.

## KAJIAN PUSTAKA

### a. Pengangguran

Pengangguran alamiah adalah suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan tak mungkin dihilangkan. Artinya jika tingkat pengangguran paling tinggi 2-3 persen itu berarti bahwa perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (*Full Employment*). Pertambahan tenaga kerja tidak dapat diimbangi oleh pertambahan kesempatan kerja yang diciptakan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru, terutama oleh pertambahan kegiatan di sektor industri. Walaupun di banyak negara berkembang tingkat pertumbuhan ekonomi telah semakin cepat dibandingkan dengan sebelumnya, ternyata kesempatan kerja baru tidak dapat mengimbangi pertambahan tenaga kerja yang terus berlangsung hingga sekarang. Sebagai akibatnya, tenaga kerja baru yang tidak memperoleh pekerjaan akan memperbesar jumlah pengangguran yang telah ada sebelumnya. Keadaan ini mempertajam masalah pengangguran yang dihadapi negara berkembang. (Sukirno, 2008).

Menurut BPS, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

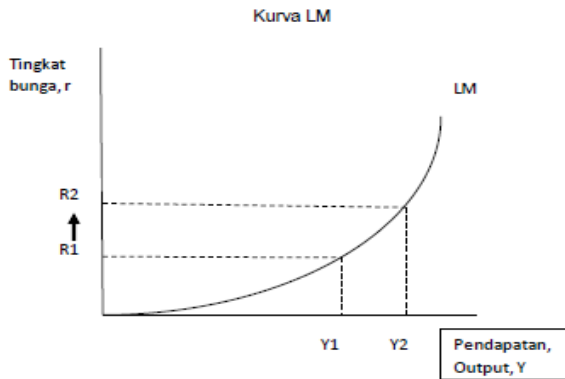
Penganggur terbuka, terdiri dari:

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

### b. Kebijakan Moneter

Pada perekonomian yang mempunyai sifat-sifat yang demikian tingkat pengeluaran masyarakat dapat diatur dengan mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau dengan mempengaruhi suku bunga. Kebijakan pemerintah untuk tujuan demikian dinamakan kebijakan moneter. Untuk mengatasi pengangguran, kebijakan moneter yang harus dilakukan adalah dengan cara menambah penawaran uang, mengurangi/menurunkan suku bunga dan menyediakan kredit khusus untuk sektor atau kegiatan tertentu (Sukirno, 2008).

- Suku bunga



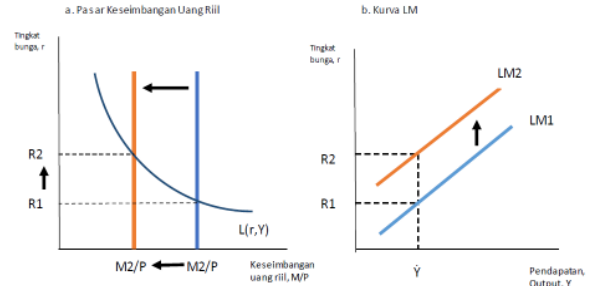
**Gambar 1. Kurva LM**

Kurva IS-LM bisa menunjukkan implikasi perubahan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter pada perekonomian agregat. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Kurva LM yang miring ke atas menunjukkan hubungan positif antara tingkat bunga dan pendapatan (Mankiw, 2007).

- Jumlah uang beredar

Uang Beredar menurut Bank Indonesia adalah kewajiban sistem moneter (Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR) terhadap sektor swasta domestik (tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk). Grafik 2.2 Menjelaskan bagaimana jumlah uang beredar dapat menggeser kurva LM.

Penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva LM ke atas. Bagian a menunjukkan bahwa untuk setiap tingkat pendapatan  $\bar{Y}$ , penurunan jumlah uang beredar mendongkrak tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang (Mankiw, 2007).



**Gambar 2. Pasar Keseimbangan dan Kurva LM**  
c. Kebijakan Fiskal

Menurut Sukirno (2008), kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Langkah-langkah yang sebaliknya harus dijalankan apabila keseluruhan pengeluaran yang dilakukan dalam perekonomian lebih kecil daripada kemampuan maksimal perekonomian memproduksi barang-barang sehingga menimbulkan deflasi dan pengangguran. Untuk mengurangi tingkat pengangguran, kebijakan fiskal yang harus dilakukan adalah dengan mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah.

- Pengeluaran Pemerintah

Menurut pendapat Keynes dalam Muslim (2014) bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga.

- Pajak

Menurut Sukirno (2010), pengurangan pajak dapat menurunkan tingkat pengangguran. Kenaikan pajak membuat konsumen mengurangi pengeluarannya sehingga membuat pendapatan berkurang. Berkurangnya pendapatan membuat permintaan akan uang berkurang, bank sentral akan merespon berkurangnya permintaan uang dengan menurunkan tingkat bunga. Adanya penurunan pendapatan menunjukkan bahwa peningkatan pajak menyebabkan resesi.

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang merupakan data time series tahunan dari tahun 1995-2019. Data tersebut yaitu tingkat pengangguran terbuka, suku bunga (SBI/BI Rate), jumlah uang beredar (M2), penerimaan pajak, dan pengeluaran pemerintah. Karena data sudah terdapat pada dinas atau instansi yang terkait, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode yang digunakan untuk mengupulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan berbagai data-data maupun teori-teori yang berhubungan dalam permasalahan yang akan diteliti. Data yang diambil adalah data yang bersumber dari situs World Bank, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis menggunakan metode *Vector Autoregressive* (VAR). Metode VAR menjelaskan bahwa setiap variabel yang terdapat dalam model tergantung pada pergerakan masa lalu variabel itu sendiri dan pergerakan masa lalu dari variabel lain yang terdapat dalam sistem persamaan. Metode VAR biasa digunakan untuk memproyeksikan sistem variabel runtun waktu (*Time Series*) dan menganalisis dampak dinamis gangguan yang terdapat dalam persamaan tersebut.

Uji Stasioneritas data dalam penelitian ini menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF). Beberapa model yang dapat dipilih untuk melakukan Uji ADF:

Jika variabel  $Y_t$  sebagai variabel dependen, maka diubah menjadi

$$Y_t = \rho Y_{t-1} + U_t \dots \dots \dots (3.1)$$

Jika koefisien  $Y_{t-1}$  ( $\rho$ ) adalah = 1 dalam arti hipotesis diterima, maka variabel mengandung unit root dan bersifat non-stasioner. Untuk mengubah trend yang bersifat non stasioner menjadi stasioner dilakukan uji orde pertama (first difference)

$$\Delta Y_t = (\rho-1)(Y_t - Y_{t-1}) \dots \dots \dots (3.2)$$

Jika koefisien  $\rho$  akan bernilai 0, dan hipotesis akan ditolak sehingga model menjadi stasioner. Sedangkan hipotesis yang digunakan pada pengujian Augmented Dickey Fuller adalah:

$H_0 : \rho = 0$  (terdapat unit root, tidak stasioner)

$H_1 : \rho \neq 0$  (tidak terdapat unit root, stasioner)

Kesimpulan hasil root test diperoleh dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel pada tabel Dickey-Fuller.

Untuk menentukan panjang lag optimal dapat digunakan beberapa kriteria yaitu dengan menggunakan Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Criterion (SC), Final Prediction Error (FPE) dan Hannan-Quinn Information Criterion (HQ). Salah satu metode yang paling umum digunakan untuk melihat panjang lag adalah dengan melihat Akaike Information Criterion (AIC). Adapun formulasi AIC adalah sebagai berikut (Kusumana, 2013):

$$AIC = \text{Log} |\sum e_t^2/N| + 2K + N \dots \dots \dots (3.3)$$

Dimana:

$e_t^2$  = Jumlah residual Kuadrat

N = Jumlah Sampel

K = Jumlah Peubah

Lag optimal yang umumnya dipilih berdasarkan nilai kriteria yang terkecil.

Untuk menguji stabilitas atau tidaknya estimasi VAR yang telah dibentuk maka dilakukan pengecekan kondisi VAR stability berupa roots of characteristic polynominal. Suatu system VAR dilakukan stabil apabila seluruh rootsnya memiliki modulus lebih kecil dari satu (Gujarati, 2003).

Estimasi dalam kajian VAR ini menggunakan jumlah lag yang telah ditentukan berdasarkan kriteria penghitungan lag optimal. Data VECM digunakan di dalam model VAR non structural apabila data time series tidak stasioner pada level, tetapi stasioner pada data diferensi dan terkointegrasi sehingga menunjukkan adanya hubungan teoritis antara variabel. Adanya kointegrasi ini maka VECM yang merupakan model VAR non structural ini disebut model VAR yang terestriksi (Fadillah, 2010).

IRF bertujuan untuk mengisolasi suatu guncangan agar lebih spesifik, yang artinya suatu variabel dapat dipengaruhi oleh shock atau guncangan tertentu. Apabila suatu variabel tidak dapat dipengaruhi oleh shock, maka shock spesifik tersebut tidak dapat diketahui melainkan shock secara umum (Beik & Fatmawati, 2014).

Analisis VD dalam model VAR bertujuan untuk memprediksi kontribusi prosentase varian setiap peubah karena adanya perubahan peubah tertentu dalam sistem VAR. Pada analisis IRF sebelumnya digunakan untuk melihat dampak guncangan dari satu peubah terhadap peubah lainnya, dalam analisis FEVD digunakan untuk menggambarkan relatif pentingnya setiap peubah dalam sistem VAR

karena adanya shock. Adapun model VAR yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$UNEMP_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^p \beta_{1i} UNEMP_{t-i} - \sum_{i=1}^p \beta_{3i} LNJB_{t-i} + \sum_{i=1}^p \beta_{4i} LNPM_{t-i} + \sum_{i=1}^p \beta_{5i} LNPK_{t-i} + \varepsilon_t \quad (3.5)$$

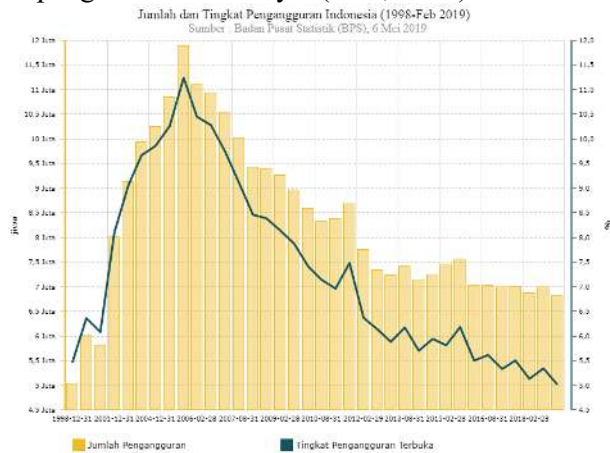
Keterangan:

- $\varepsilon$  : Error term
- t : Periode
- i- p : Lag length
- UNEMP : Pengangguran
- SB : Suku Bunga
- LNJB : Jumlah Uang beredar
- LNPM : Pengeluaran Pemerintah
- LNPK : Pajak

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

a. Perkembangan pengangguran

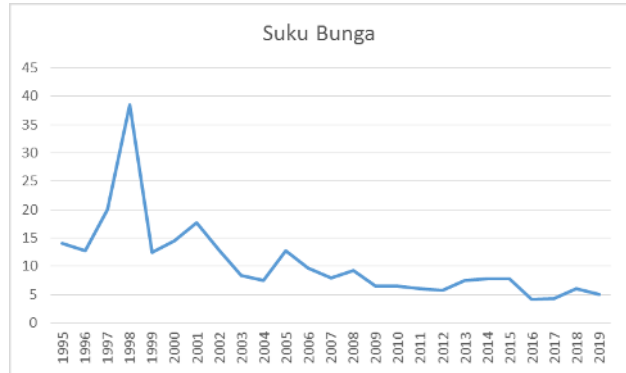
Letak geografis Indonesia yang berada di 6° LU- 11° LS dan 95° BT – 141° BT yang terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta terletak diantara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 mencapai 267,7 jiwa. Salah satu masalah dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah pengangguran. Kecenderungan peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia yang cepat terjadi sejak terkena dampak krisis tahun 1997 hingga saat ini disebabkan adanya berbagai faktor yang secara simultan dan kompleks berpengaruh di dalamnya. (BPS, 2006).



**Gambar 3. Jumlah Pengangguran di Indonesia tahun 1998-2019**

b. Perkembangan suku bunga

Berikut data suku bunga acuan BI dari tahun 1995-2019.



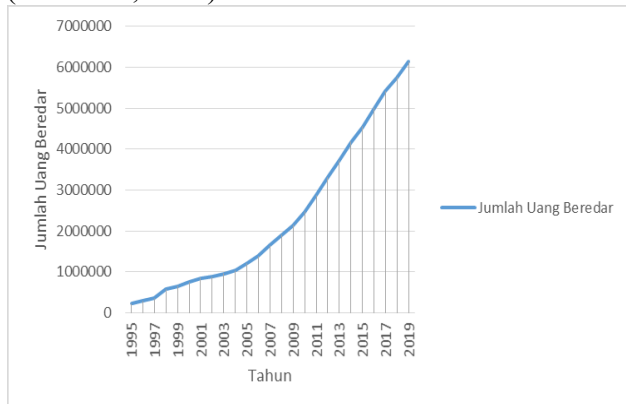
**Gambar 4. Suku Bunga BI tahun 1995-2019**

Pada tahun 1995-2019, suku bunga di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Suku bunga tertinggi terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 36 persen. Hal tersebut terjadi karena pada saat itu kurs dolar Amerika terhadap rupiah mengalami kenaikan (Luwihadi, 2017).

c. Perkembangan jumlah uang beredar

Jumlah Uang Beredar (JUB) merupakan salah satu faktor utama pergerakan tingkat inflasi. Di Indonesia jumlah uang beredar terus mengalami peningkatan yang stabil setiap tahunnya seperti yang terlihat pada gambar 5.

Jumlah uang beredar di Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun 1995 hingga tahun 2019. Jumlah uang beredar yang terus meningkat di Indonesia terjadi karena kebutuhan akan uang untuk konsumsi masyarakat selalu bertambah dan menyebabkan inflasi yang tinggi setiap tahunnya (Luwihadi, 2017).

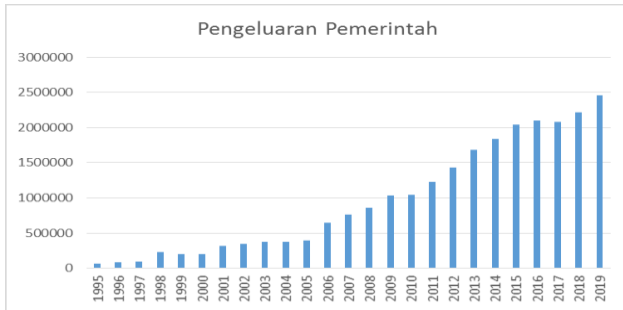


**Gambar 5. Jumlah Uang Beredar Tahun 1995-2019**

d. Perkembangan pengeluaran pemerintah

Perkembangan penduduk di Indonesia menuntut adanya pengeluaran pemerintah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah akan

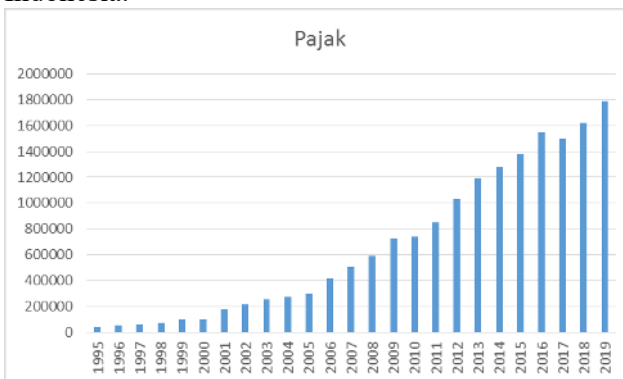
menciptakan sarana dan prasarana pembangunan naik dan pada akhirnya akan mendorong aggregate demand meningkat sehingga produksi nasional meningkat dan tenaga kerja dapat terserap. Pengeluaran pemerintah di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun pertahun.



**Gambar 6. Pengeluaran Pemerintah tahun 1995-2019**

e. Perkembangan pajak

Dalam satu dekade terakhir nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami peningkatan yang sangat besar. Total belanja pemerintah ini memberikan kontribusi antara 16,2%-19,9% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional. Untuk mendanai Belanja Negara tersebut, pemerintah memerlukan sumber-sumber pendapatan negara baik berupa penerimaan perpajakan maupun penerimaan bukan pajak. Dalam beberapa dekade terakhir, kontribusi penerimaan perpajakan jauh lebih banyak dibanding kontribusi penerimaan bukan pajak (Amir, 2014). Berikut data penerimaan pajak di Indonesia.



**Gambar 7. Penerimaan Pajak 1995-2019**

Pada Gambar 7 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun penerimaan pajak di Indonesia mengalami peningkatan. Meskipun perkembangan penerimaan pajak terus meningkat, *Tax Ratio* Indonesia

cenderung stabil dalam periode tersebut (Kemenkeu, 2019).

f. Hasil penelitian

**Tabel 2. Hasil Uji Stasioneritas Augmented Dickey-Fuller (ADF)**

No	Variabel	Tingkat Stasioneritas					
		Level	1 <sup>st</sup> difference	Level	1 <sup>st</sup> difference	Level	1 <sup>st</sup> difference
1	TPT	-0.882128	0.771*	Tidak stasioner	-4.479838	0.0016	Stasioner
2	SB	-1.254890	0.631*	Tidak stasioner	-3.854828	0.0004	Stasioner
3	LNJUB	-0.818222	0.758*	Tidak stasioner	-4.888188	0.0008	Stasioner
4	LNPM	-4.588180	0.0014	Stasioner	-8.788381	0.0000	Stasioner
5	LNPM	-0.888828	0.6974	Tidak stasioner	-8.231627	0.0000	Stasioner

Hasil ADF test terhadap variabel pada tingkat level menunjukkan bahwa dari enam variabel, hanya satu variabel yang stasioner yaitu Pengeluaran Pemerintah (LNPM). Hal ini ditunjukkan oleh nilai probability yang lebih besar dari  $\alpha$  (5%). Karena tidak stasioner maka dilakukan first difference dan dilakukan uji ADF terhadap data tersebut. Dari test menunjukkan bahwa semua variabel pada tingkat first difference bersifat stasioner, dengan demikian maka data yang telah stasioner tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisis dengan menggunakan model VAR. Hasil selengkapnya dari uji unit root test dapat dilihat pada tabel 2. Pendekatan VAR sangat sensitif terhadap jumlah lag data yang digunakan, maka perlu ditentukan jumlah lag yang optimal. Penentuan panjang lag dimanfaatkan untuk mengetahui lamanya periode keterpengaruhannya suatu variabel terhadap variabel masa lalunya maupun terhadap variabel endogen lainnya.

**Tabel 3. Hasil Penentuan Panjang Lag Optimum**

VAR Lag Order Selection Criteria  
 Endogenous variables: D(TPT) D(SB) D(LNJUB) D(LNPM) D(LNPMJK)  
 Exogenous variables: C  
 Date: 06/08/20 Time: 19:16  
 Sample: 1995 2019  
 Included observations: 22

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-54.75045	NA	0.000157	5.431859	5.679823*	5.490272
1	-25.24712	42.91393*	0.000112	5.022486	6.510251	5.372943
2	10.18673	35.43385	6.62e-05*	4.073934*	6.801540	4.716476*

\* indicates lag order selected by the criterion  
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)  
 FPE: Final prediction error  
 AIC: Akaike information criterion  
 SC: Schwarz information criterion  
 HQ: Hannan-Quinn information criterion

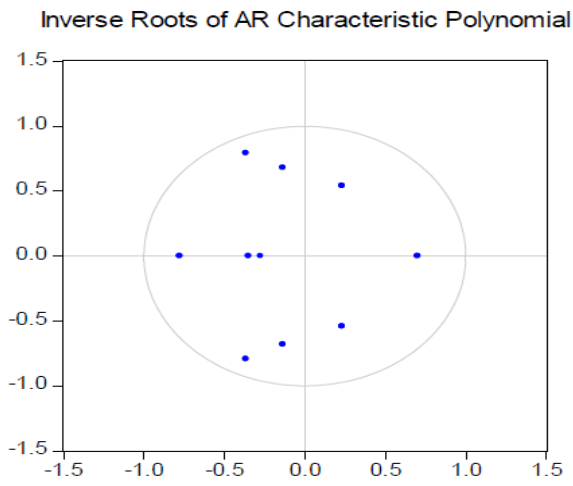
Berdasarkan tabel 3. panjang lag yang optimal terletak pada lag 2. Penetapan lag optimum bertujuan untuk menunjukkan berapa lama reaksi suatu variabel terhadap variabel lainnya serta

menghilangkan masalah autokorelasi dalam sebuah sistem VAR.

Untuk menguji stabil atau tidaknya estimasi VAR yang telah ditentukan maka dilakukan VAR condition stability check yakni berupa roots of characteristic polynominal. Suatu model VAR dikatakan stabil jika seluruh roots nya memiliki modulus lebih kecil dari 1 (Gujarati, 2003).

Dari hasil pengujian stabilitas VAR di atas, menunjukkan bahwa tidak ada akar unit yang terlihat dari tabel maupun gambar yang ada di atas. Dimana table memiliki modulus lebih kecil dari 1, dan hal tersebut juga didukung dari gambar yang ada di atas dari gambar titik *Invers Roots Of AR Characteristic polynominal* yang kesemua variabel berada dalam lingkaran. Berarti sudah jelas bahwa variabel yang telah digunakan oleh penulis dengan menggunakan pengujian model VAR sudah stabil atau sudah stasioner.

Berikut hasil uji stabilitas VAR yang disajikan dalam gambar 4:



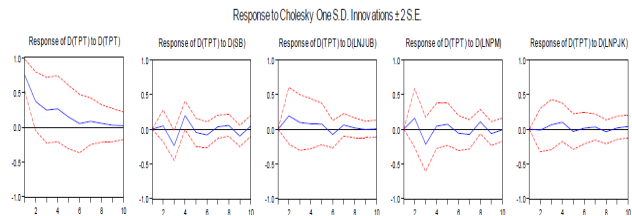
**Gambar 8. Hasil Uji Stabilitas VAR Model Empiris VAR**

Tahap selanjutnya setelah menentukan panjang lag adalah membentuk model VAR. Model VAR yang dibentuk merupakan VAR difference bukan ditujukan untuk menguji apakah terdapat kointegrasi maupun koreksi kesalahan atau tidak, melainkan untuk menghindari terjadinya spurious regression akibat data yang tidak stasioner. Panjang lag yang digunakan dalam estimasi VAR ini adalah lag 5 sesuai dengan penentuan lag yang optimal.

Hasil model VAR tidak akan dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini. Dalam sistem VAR fungsi yang paling penting dalam estimasi adalah

IRF dan hasil FEVD (Gujarati, 2015), sehingga dalam rangka untuk menjawab tujuan penelitian alat yang digunakan akan fokus kepada hasil IRF dan hasil FEVD.

Fungsi dari Impulse Response adalah untuk melihat respon variabel endogen dari waktu ke waktu terhadap guncangan (Shock) variabel tertentu dan berapa lama guncangan tersebut terjadi (Basuki, 2015).



**Gambar 9. Hasil Uji Impulse Response**

Pada Grafik diatas menunjukkan bahwa variabel Suku Bunga (SB) lebih merespon terhadap guncangan variabel TPT dibandingkan dengan variabel lainnya. Pada periode satu hingga periode empat respon TPT terhadap SB memberikan respon positif yang berfluktuatif. Kemudian pada periode empat mengalami penurunan lalu cenderung stabil mengalami kenaikan pada periode selanjutnya.

Analisis bertujuan untuk mengukur komposisi atau kontribusi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya.

**Tabel 4. Hasil Uji Variance Decomposition**

Period	S.E.	D(TPT)	D(SB)	D(LNJOB)	D(LNPM)	D(LNPJK)
1	0.752917	100.0000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	0.877999	91.51796	0.293404	4.817381	3.341459	0.029794
3	0.974291	80.67758	6.188158	4.884936	7.760871	0.478455
4	1.037512	77.68733	9.069500	4.859820	7.035974	1.347373
5	1.054606	77.11593	8.990939	5.199280	7.279276	1.414576
6	1.063493	76.08680	9.445723	5.621414	7.456672	1.409393
7	1.072444	75.43631	9.391156	5.862836	7.844495	1.465199
8	1.081487	74.43278	9.494518	5.790100	8.711120	1.571485
9	1.088658	73.52958	10.22093	5.717097	8.951831	1.580561
10	1.090614	73.30690	10.37841	5.699690	8.924633	1.690370

Tabel 4 merupakan hasil dari Variance Decomposition dari TPT dipengaruhi oleh variabel itu sendiri sebesar 100%, dan selanjutnya pada periode ke sepuluh pengaruh dari TPT berkurang menjadi 73%. Pada table diatas juga dapat dilihat bahwa pada periode pertama variabel TPT dipengaruhi oleh SB sebesar 0%, akan tetapi pada akhir periode SB mempengaruhi TPT sebesar 10,37%. Untuk variabel LNJOB berpengaruh 0% terhadap TPT di awal periode, namun meningkat menjadi 5.69% di akhir periode. Selanjutnya variabel LNPM berpengaruh 0% di awal periode dan meningkat menjadi 8.92% di akhir periode. Selanjutnya variabel LNPJK mempengaruhi TPT



sebesar 0% di awal periode namun mengalami kenaikan sebesar 1.69% di akhir periode.

## KESIMPULAN

Di awal pengamatan, variabel LNJUB memiliki pengaruh yang dominan dibandingkan dengan variabel lainnya yakni sebesar 4.81%. Sedangkan pada akhir pengamatan, variabel SB memiliki variance yang lebih dominan dalam mempengaruhi Pengangguran yaitu sebesar 10.37%. variabel SB lebih dominan tinggi dibandingkan variabel LNPM walaupun kedua variabel tersebut sama-sama berpengaruh tinggi terhadap pengangguran. Selisih keduanya tidaklah jauh. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan moneter yaitu suku bunga dan jumlah uang beredar lebih berpengaruh terhadap pengangguran dibandingkan dengan kebijakan fiskal yakni pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak. Untuk menjawab tujuan penelitian, penulis membuat hasil penelitian sebagai berikut:

1. Suku Bunga (SB) memiliki kemampuan dalam mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 10.37%.
2. Jumlah uang beredar (LNJUB) memiliki kemampuan dalam mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5.69%.
3. Pengeluaran Pemerintah (LNPM) memiliki kemampuan dalam mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 8.92%.
4. Penerimaan Pajak (LNPJK) memiliki kemampuan dalam mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 1.6%.

## DAFTAR PUSTAKA

Attamah, N., Anthony, Ukpere, W. I. (2015) The Impact Of Fiscal And Monetary Policies On Unemployment Problem In Nigeria (Managerial Economic Perspective). Risk governance & control: financial markets & institutions Volume 5, Issue 2.

Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari <http://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 11 September 2019 pada jam 20.20 WIB.

Beik, I., & Fatmawati, S. (2014) Pengaruh Indeks Harga Saham Internasional dan Variabel Makroekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index. Jurnal Al-Iqtishad Vol. VI No.2

Deliarnov. (2009). Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Edisi Revisi). Jakarta: PT.Grafindo Persada.

Fadillah, R. (2010). Analisis Perbandingan Keseimbangan Risiko dan Pengembalian Risk Return Trade Off Saham antara Jakarta Islamic Indec Dengan Lq 45 di Bursa Efek Indonesia. Skripsi UIN Jakarta.

Gujarati, D., N. (2015). Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Penerbit Salemba

Luwihadi, N. L. A, & Arka, S. (2017). Determinan Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 1984-2014. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 6, No. 4.

Mankiw, N Gregory. (2007). Makroekonomi. Jakarta : Erlangga.

Muslim, M. R. (2014). Pengangguran Terbuka dan Determinannya. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan Volume 15, Nomor 2, 1(1), hlm.171-181.

Prasetyia, F. (2012). Analisis Keputusan Nasabah Menabung: Pendekatan Komponen dan Model Logistik Studi Pada bank Syariah di Malang. Journal of Indonesian Applied Economics, 4(1), 43-57.

Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus. (1994). Makroekonomi. Edisi ke-empat belas. Jakarta: Erlangga.

Sukirno, Sadono. (2006). Ekonomi Pembangunan. Jakarta:Kencana

Sumando. E. (2015). Fiscal and Monetary Policy Interaction in Indonesia: a VAR Analysis From 200 to 2013. Jurnal BPPK, Volume 8 Nomor 2, 2015, Halaman 183-190

Tagkalakis, O. A. (2013). The unemployment effects of fiscal policy: recent evidence from Greece. Journal of European Labor Studies 2013, 2:11